

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN AKUNTANSI AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

Jayanti Mandasari

Alumni Program Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta,

Zulkifli

Prodi Akuntansi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta,
email : zul@gmail.com

Abstract

The purposes of this study are : 1. to analyze the influence between the education level of financial staff on the application of accrual accounting. 2. to analyze the effect of the experience of running the cash basis toward accruals on the accrual accounting application. This research design is quantitative research by using regression test, where the principal data from samples of a population is collected by distributing questionnaire instrument. Hypothesis testing performed by Multiple Linear Regression was used to test the effect between variables of education staff finance level (X1) and experience running cash basis toward Accrual (X2) on Accrual Accounting (Y) application. The results of this study indicate that: a) The level of education of financial staff (X1) has a positive influence on the application of accrual accounting (Y). This is indicated by the results of research showing that staff education level has an explanation power of 59.3%. b) The result of experience analysis running cash basis toward accrual (X2) show value t count equal to 4,744 with sig. 0,000. Therefore the value of sig. <0.05 then Ho is rejected, which means experience running the cash basis (X2) has a positive effect on the application of accrual accounting (Y).

Key words: *The Readines of human resources, Accrual accounting, Government Regulation No. 71 of 2010, the level of education of financial staff, the experience of running the cash basis toward accruals.*

PENDAHULUAN

Meningkatnya peran daerah dalam pengelolaan keuangan untuk lebih mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan secara vertikal dan horizontal semakin tinggi. Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Pertanggungjawaban horisontal (*horizontal*

accountability) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (Mardiasmo 2002: 21).

Wacana tentang *good governance* pada organisasi pemerintahan atau yang disebut dengan *good goverment governance* merupakan isu yang paling mengemuka pada era reformasi sampai dengan sekarang ini. Tuntutan masyarakat agar pengelolaan keuangan negara dijalankan

dengan transparan dan akuntabel sejalan dengan keinginan masyarakat internasional. Salah satu kunci pengembangan di dalam tata kelola sektor publik selama lebih dari 15 tahun adalah adanya dorongan yang kuat oleh lembaga-lembaga internasional, seperti *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)*, *the International Monetary Fund (IMF)*, dan *World Bank*, kepada negara-negara di dunia untuk mengganti sistem akuntansi tradisionalnya dari akuntansi berbasis kas ke sistem akuntansi berbasis akrual seperti pada sektor swasta. Tuntutan dari masyarakat internasional tersebut juga berdampak pada sistem akuntansi pemerintahan di Indonesia.

Berdasarkan jenis kelamin responden pegawai BKAD Kabupaten Bantul sebagian besar adalah kelompok berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 19 responden (63,333%) dan sebanyak 11 responden (36,666%) pada kelompok berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikan akhir responden pegawai BKAD Kabupaten Bantul sebagian besar adalah lulusan Sarjana Stata 1 (S1) yaitu sebanyak 18 responden (60,00 %), lulusan strata 2 (S2) sebanyak 7 responden (23,334%) dan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 5 responden (16,667%). Berdasarkan masa kerja responden pegawai BKAD Kabupaten Bantul adalah sebagian besar responden memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun yaitu sebanyak 12 responden (40,00 %), masa kerja lebih dari 15 tahun sebanyak 7 responden (23,334%), masa kerja lebih dari 10 tahun sebanyak 3 responden (10,00%) dan masa kerja lebih dari 5 tahun sebanyak 8 responden (26,667%).

Pada penelitian sebelumnya (Hetti Herlina, 2013) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan pemda dalam implementasi kebijakan. Kebijakan yang dimaksud dalam penelitiannya adalah

PP 71 Tahun 2010, yang membahas tentang perubahan sistem akuntansi dari sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual (PP 24 tahun 2005) menjadi sistem akuntansi berbasis akrual penuh (PP 71 tahun 2010). Penelitian terdahulu tidak membahas sistem akuntansi, karena yang diteliti adalah faktor yang mempengaruhi kesiapan pemda bukan kesiapan sistem akuntansi tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan Pemda di Kabupaten Nias Selatan dalam mengimplementasikan PP No 71 Tahun 2010 dipengaruhi oleh faktor informasi, faktor perilaku, dan faktor keterampilan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ida Najati, Endar Pituringsih, dan Animah Magister Pasca Sarjana Universitas Mataram yang berjudul "Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual: Pengujian Determinan dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga". Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan aplikasi SAIBA tidak berpengaruh terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan operator tentang penyusunan jurna penyesuaian dan pengembangan aplikasi SAIBA yang tidak melibatkan pengguna. Temuan lain adalah pelatihan akuntansi berpengaruh terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual. Semakin baik dan semakin memadai pelatihan akuntansi yang dilakukan, maka akan semakin mendukung dan meningkatkan implementasi akuntansi berbasis akrual.

Budaya organisasi berpengaruh terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual. Budaya *siri' na pacce* yang dijunjung tinggi mampu mendorong operator aplikasi SAIBA untuk menerima dan menerapkan akuntansi berbasis akrual. Semakin kuat budaya organisasi akan semakin mendukung implementasi akuntansi berbasis akrual. Implementasi akuntansi berbasis akrual mempunyai implikasi

terhadap kualitas LKKL. Hal ini disebabkan karena dengan basis akrual, informasi yang dihasilkan lebih komprehensif dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga akan meningkatkan kualitas LKKL yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Semakin baik implementasi akuntansi berbasis akrual, maka semakin meningkatkan kualitas LKKL.

Terdapat alasan mengapa penelitian mengenai penerapan akuntansi akrual pada pemerintah ini perlu dilakukan, terutama karena konsep akuntansi akrual di lingkungan pemerintah masih sangat baru, dan amanat undang-undang agar pemerintah segera menggunakan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual merupakan proses yang berkesinambungan dan terpadu. Pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam pengenalan sistem akuntansi yang baru, khususnya pada konteks pemerintahan adalah penting. keberhasilan atau kegagalan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah tidak lepas dari peran satuan kerja dan pengaruh dari faktor-faktor yang ada pada satuan kerja tersebut, mulai dari faktor sumber daya manusia seperti tingkat pendidikan staf, pelatihan yang diberikan, dan latar belakang pendidikan pimpinan, faktor organisasional seperti kualitas teknologi informasi dan dukungan konsultan, maupun faktor situasional lainnya seperti pengalaman satuan kerja dalam menjalankan basis kas menuju akrual dan ukuran satuan kerja tersebut.

Kontribusi utama dari penelitian ini adalah memberikan bukti empiris dari tingkat keberhasilan dalam menerapkan sistem akuntansi akrual dan faktor-faktor yang berperan dalam implementasi tersebut. Serta untuk meningkatkan pemahaman kepada para peneliti dan para pimpinan mengenai proses implementasi

dan tantangan reformasi, serta membantu memperbaiki model dan meningkatkan sistem yang efektif dalam proses implementasi dan proses tender-tender di masa depan.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif. Ini berarti bahwa harus ada penekanan pada pengendalian strategis dari pengeluaran agregat dan pengaturan prioritas dan fasilitas, efisiensi dan efektivitas melalui pendelegasian wewenang manajemen dengan akuntabilitas untuk hasil. Untuk mencapai itu, para pembuat keputusan semua tingkatan di sektor publik membutuhkan informasi yang lebih akurat dan bermanfaat. Hal ini pada gilirannya, mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan radikal dalam sistem administrasi publik. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul masih mengalami beberapa kendala dalam penerapan Akuntansi Berbasis Akrual seperti dalam penilaian aset yang dimiliki, semua aset yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul harus dapat dinilai secara material sementara setiap Dinas/Badan memiliki aset (aktiva) yang berbeda-beda sehingga membutuhkan waktu adaptasi yang cukup lama. Bila dilihat dari latar belakang pendidikan, tidak semua karyawan bagian Keuangan memiliki latar belakang pendidikan khususnya Akuntansi sehingga membutuhkan beberapa penyesuaian, pelatihan dan pemahaman terhadap aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pernyataan masalah penelitian sebagai berikut : "Tingkat pendidikan staf dan pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual dalam penerapan akuntansi akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten

Bantul belum optimal". Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah: menganalisis pengaruh tingkat pendidikan staf keuangan terhadap penerapan akuntansi akrual, dan menganalisis pengaruh pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual terhadap penerapan akuntansi akrual.

RERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

a. Tingkat Pendidikan Staf Keuangan Terhadap Penerapan Akuntansi Akrual

Penyampaian laporan keuangan pemerintah secara transparan dan akuntabel masih sulit diterapkan bagi aparat daerah, tepat waktu, dan disusun sesuai SAP. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran, khususnya keahlian bidang akuntansi (Zetra dalam Kusuma, 2009), maka dari itu latar belakang pendidikan staf keuangan termasuk dalam peran utama dalam penerapan sistem akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh Stamatiadis (2009) menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat pendidikan staf akuntansi dengan kepatuhan akuntansi. Tingkat pendidikan staf keuangan (X_1), Pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual (X_2) dan Implementasi Akuntansi Akrual (Y). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2013), pendidikan staf keuangan memiliki pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat penerapan akrual. Menurut Sumarsono (2003:4) sumber daya manusia adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Kelemahan laporan keuangan dapat dihindari dari penyusunan

laporan keuangan berbasis akrual dibutuhkan sumber daya manusia yang dapat memahami SAP berbasis akrual. Dipertegas oleh pendapat Darvis (2010) yang menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh pada faktor regulasi, yaitu sumber daya manusia. Pengimplementasian akuntansi berbasis akrual membutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan berkompeten dalam akuntansi pemerintahan keuangan daerah.

Atas dasar penelitian empiris tersebut, perumusan hipotesis yang dikemukakan sebagai berikut:

H_1 : Tingkat pendidikan staf keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat penerapan akuntansi akrual.

b. Pengalaman Sebelumnya Dalam Menjalankan Basis Kas Menuju Akrual Terhadap Penerapan Akuntansi Akrual

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual, atau yang terlebih dahulu menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual diharapkan akan mencapai level pemahaman dan penerapan yang lebih baik dalam adopsi dan implementasi sistem yang baru. Menurut Christiaens, (1999), organisasi dengan pengalaman jangka panjang dalam menerapkan akuntansi akrual diharapkan akan mencapai tingkat kepatuhan akuntansi yang lebih baik. Penelitian sebelumnya oleh Stamatiadis, et al (2009) memperlihatkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman dengan tingkat kepatuhan akuntansi akrual. Atas dasar penelitian empiris tersebut, perumusan hipotesis yang dikemukakan sebagai berikut:

H_2 : Pengalaman satuan kerja dalam menjalankan basis kas menuju akrual berpengaruh positif terhadap penerapan akuntansi akrual

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan metoda pengumpulan data menggunakan metode *survey*, yang mana data pokok dari sampel suatu populasi dikumpulkan dengan menggunakan instrument kuesioner di lapangan. Penelitian ini menggunakan *Skala Likert* yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Sampel dalam penelitian ini terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai di bidang akuntansi/keuangan di masing-masing unit SKPD. Teknik Pengambilan Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan kriteria tertentu: Pegawai SKPD pada Badan dan Dinas di lingkup Kabupaten Bantul, Pegawai SKPD yang bekerja pada bidang akuntansi/keuangan pada Badan dan Dinas di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dengan menggunakan kuesioner.

Pengembangan kuisisioner ini mengacu pada penelitian Audi Norma Universitas Islam Indonesia dengan judul "Dampak Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua". Pada penelitian sebelumnya terdapat empat variabel yang diteliti yaitu : Penerapan SAP Berbasis Akrua, Akuntabilitas Laporan Keuangan, Transparansi Laporan Keuangan, Kualitas Pengambilan Keputusan. Pada penelitian ini variabel yang diteliti yaitu : Tingkat

Pendidikan Staf Keuangan dan Pengalaman menjalankan Akuntansi Basis Kas menuju Akrua. Pada penelitian terdahulu lebih menekankan pada dampak dari implementasi sedangkan penelitian sekarang menganalisis apakah tingkat pendidikan staf keuangan dan pengalaman menjalankan kas basis menuju akrua basis berpengaruh terhadap penerapan akuntansi akrua pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dengan menyebarkan kuesioner pada pegawai SKPD di bidang keuangan/akuntansi pada dinas atau badan di lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan penelitian diperoleh data yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan karakteristik responden yaitu karyawan atau pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) kabupaten Bantul. Penyajian data mengenai identitas responden disini, yaitu untuk memberikan gambaran tentang keadaan data individu dari responden, yang meliputi jenis kelamin, masa kerja dan pendidikan terakhir dapat disajikan pada tabel 1.

Uji Validitas Dan Uji Reliabilitas

Uji validitas ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji kesahihan dari angket yang dipergunakan mampu untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Suatu kuisisioner dikatakan valid (handal) jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan yang terdapat dalam kuisisioner tersebut adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator

Tabel 1.

Ringkasan Informasi data identitas dan latar belakang dari responden

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Berdasarkan Jenis Kelamin		
	Laki – laki	19	63,33%
	Perempuan	11	36,67%
	Total	30	100%
2.	Berdasarkan Tingkat Pendidikan Akhir		
	SMA	5	16,67%
	Strata 1 (S1)	18	60,00%
	Starata 2 (S2)	7	23,33%
	Total	30	100%
3.	Berdasarkan Masa Kerja		
	> 5 Tahun	8	26,67%
	>10 Tahun	3	10,00%
	>15 Tahun	7	23,33%
	>20 Tahun	12	40,00%
	Total	30	100%

dari variabel. Suatu kuisisioner dikatakan reliabel apabila jawaban responden atas pertanyaan pada setiap variabel selalu

konsisten dari waktu ke waktu. Untuk hasil lengkap dari uji validitas dan uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2.

Ringkasan Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

No.	Keterangan	Sig. (2-tailed)	Hasil Uji	Keterangan	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Hasil Uji
1.	Uji Validitas X1			Uji Reliabilitas X1		
	X1.1	.000	Lolos Uji Validitas	X1.1	.781	Lolos Uji Reliabilitas
	X1.2	.000		X1.2	.769	
	X1.3	.000		X1.3	.754	
	X1.4	.000		X1.4	.759	
	X1.5	.000		X1.5	.765	
	X1.6	.001		X1.6	.810	

2.	Uji Validitas X2			Uji Reliabilitas X2		
	X2.1	.004	Lolos Uji Validitas	X2.1	.840	Lolos Uji Reliabilitas
	X2.2	.002		X2.2	.837	
	X2.3	.000		X2.3	.818	
	X2.4	.000		X2.4	.821	
	X2.5	.003		X2.5	.838	
	X2.6	.002		X2.6	.837	
	X2.7	.000		X2.7	.828	
	X2.8	.001		X2.8	.834	
	X2.9	.000		X2.9	.831	
	X2.10	.000		X2.10	.830	
	X2.11	.000		X2.11	.831	
	X2.12	.004		X2.12	.839	
	X2.13	.010		X2.13	.841	
3.	Uji Validitas Y			Uji Reliabilitas Y		
	Y.1	.000	Lolos Uji Validitas	Y.1	.812	Lolos Uji Reliabilitas
	Y.2	.000		Y.2	.811	
	Y.3	.003		Y.3	.825	
	Y.4	.001		Y.4	.820	
	Y.5	.001		Y.5	.825	
	Y.6	.024		Y.6	.838	
	Y.7	.001		Y.7	.823	
	Y.8	.000		Y.8	.816	
	Y.9	.003		Y.9	.825	
	Y.10	.002		Y.10	.824	
	Y.11	.002		Y.11	.825	
	Y.12	.002		Y.12	.824	
	Y.13	.008		Y.13	.827	
	Y.14	.000		Y.14	.819	

Uji Validitas X1: Variabel dikatakan valid jika nilai signifikansi kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh item variabel X1 telah lolos uji validitas.

Uji Reliabilitas X1: Variabel penelitian dikatakan reliabel jika nilai cronbach's alpha > 0,70. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian telah lolos uji reliabilitas.

Uji Validitas X2 : Variabel dikatakan valid jika nilai signifikansi kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh item variabel X2 telah lolos uji validitas.

Uji Reliabilitas X2: Variabel penelitian dikatakan reliabel jika nilai cronbach's alpha > 0,70. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian telah lolos uji reliabilitas.

Uji Validitas Y: Variabel dikatakan valid jika nilai signifikansi kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh item variabel Y telah lolos uji validitas.

Uji Reliabilitas: Variabel penelitian dikatakan reliabel jika nilai cronbach's alpha > 0,70. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian telah lolos uji reliabilitas.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Ringkasan Uji Asumsi Klasik disajikan pada tabel 3.

Uji Normalitas : Variabel dikatakan berdistribusi normal jika nilai Asymp. Sig lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh variabel telah memiliki nilai Asymp. Sig yang lebih besar dari 0,05, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel telah berdistribusi normal.

Uji Linieritas : Hubungan dua variabel dikatakan linier jika nilai sig F pada deviation from linearity lebih besar dari 0,05. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai sig F pada deviation from linearity 0,143 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan penerapan akuntansi akrual dengan tingkat pendidikan staf bersifat linier. Hubungan dua variabel dikatakan linier jika nilai sig F pada devia-

tion from linearity lebih besar dari 0,05. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai sig F pada deviation from linearity 0,163 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan penerapan akuntansi akrual dengan pengalaman menjalankan basis kas bersifat linier.

Uji Multikolinieritas : Variabel dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika nilai VIF kurang dari 10. Berdasarkan hasil di atas dapat diketahui bahwa nilai VIF sebesar 1,032 < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara tingkat pendidikan staf keuangan dan pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Homogenitas : Berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bahwa nilai t hitung yang ditemukan sebesar 0,083 dan -1,979 dengan sig 0,934 dan 0,058. Oleh karena nilai sig > 0,05 maka dapat disimpulkan untuk persamaan tingkat pendidikan staf dan pengalaman menjalankan basis kas tidak terjadi heterokedastisitas.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan Regresi Linier Berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel-variabel tingkat pendidikan staf keuangan (X1) dan pengalaman menjalankan basis kas menuju Akrua (X2) terhadap penerapan Akuntansi Akrua (Y). Pengaruh antara variabel-variabel tingkat pendidikan staf keuangan dan pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual terhadap penerapan akuntansi akrual diuji dengan regresi linier berganda. Hasil pengujian disajikan pada tabel 4.

Tabel 4.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Berganda	T	Sig.
Tingkat Pendidikan Staf	3.218	.003
Pengalaman Menjalankan Basis Kas	4.744	.000

Tabel 3.
Ringkasan Uji Asumsi Klasik

No.	Keterangan		
1.	Uji Normalitas	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
		Kolmogorov-Smirnov Z	Asymp. Sig. (2-tailed)
	Tingkat Pendidikan Staf	1.149	.142
	Pengalaman Menjalankan Basis Kas Menuju AkruaI	.860	.451
	Penerapan Akuntansi AkruaI	.939	.342
2.	Uji Linieritas	ANOVA Table	
		Sig.	
	Penerapan Akuntansi AkruaI * Tingkat Pendidikan Staf	.143	
	Penerapan Akuntansi AkruaI * Pengalaman Menjalankan Basis Kas to AkruaI	.163	
3.	Uji Multikolinieritas	Collinearity Statistics	
		VIF	
	Tingkat Pendidikan Staf	1.032	
	Pengalaman Menjalankan Basis Kas	1.032	
4.	Uji Homogenitas	Coefficients^a	
		T	Sig.
	Tingkat Pendidikan Staf	.083	.934
	Pengalaman Menjalankan Basis Kas	-1.979	.058

Persamaan garis regresi:

$$Y = 0,714 + 0,294 X_1 + 0,569 X_2$$

- a. Hasil analisis menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,218 dengan sig. 0,003. Oleh karena nilai sig. < 0,05 maka H_0 ditolak, yang artinya tingkat pendidikan staf keuangan (X_1) berpengaruh positif terhadap penerapan akuntansi akruaI

(Y). Berpengaruh positif artinya jika tingkat pendidikan staf naik, maka penerapan akuntansi akruaI juga akan naik, dan jika tingkat pendidikan staf turun, maka penerapan akuntansi akruaI juga akan turun.

Uji t dimaksudkan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel

dependen (Penerapan Akuntansi Akrua). Hasil penelitian membuktikan bahwa tingkat pendidikan staf keuangan berpengaruh signifikan terhadap penerapan akuntansi akrua. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi akrua dipengaruhi oleh tingkat pendidikan staf keuangan. Pada penelitian ini dapat ditunjukkan melalui hasil nilai korelasi determinan antara tingkat pendidikan staf (X1) terhadap penerapan akuntansi akrua (Y) sebesar 0,294, dan memiliki nilai peluang sig sebesar 0,000.

Gambaran umum tingkat pendidikan staf keuangan di BKAD Pemerintah Kabupaten Bantul, menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan rata-rata lulusan Sarjana strata 1 (S1). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan staf keuangan maka proses penerapan akuntansi akrua di harapkan akan mencapai level pemahaman dan penerapan yang lebih baik.

- b. Hasil analisis menunjukkan nilai t hitung sebesar 4,744 dengan sig. 0,000. Oleh karena nilai sig. < 0,05 maka H_0 ditolak, yang artinya pengalaman menjalankan basis kas menuju akrua (X2) berpengaruh positif terhadap penerapan akuntansi akrua (Y). Berpengaruh positif artinya jika pengalaman menjalankan basis kas naik, maka penerapan akuntansi akrua juga akan naik, dan jika pengalaman menjalankan basis kas turun, maka penerapan akuntansi akrua juga akan turun.

Hasil penelitian membuktikan bahwa pengalaman menjalankan basis kas menuju akrua (X2) berpengaruh signifikan terhadap penerapan akuntansi akrua (Y). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi akrua dipengaruhi oleh pengalaman menjalankan basis

kas menuju akrua. Pada penelitian ini dapat ditunjukkan melalui hasil nilai korelasi determinan antara pengalaman menjalankan basis kas menuju akrua (X2) terhadap penerapan akuntansi akrua (Y) sebesar 0,569, dan memiliki nilai peluang sig sebesar 0,000.

Dari data yang diperoleh sebesar 40,00% responden memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun. Menurut Christiaens, (1999) organisasi dengan pengalaman jangka panjang dalam menerapkan akuntansi akrua diharapkan akan mencapai tingkat kepatuhan akuntansi yang lebih baik.

Sistem akuntansi berbasis akrua merupakan sistem akuntansi modern yang banyak diterapkan di negara maju. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrua dilaksanakan selambat-lambatnya 5 tahun. Terbitnya PP 71 tahun 2010 merupakan implementasi Undang-Undang tersebut, walaupun untuk penerapannya dapat dilakukan secara bertahap. Dengan penerapan akuntansi berbasis akrua diharapkan akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemerintah, masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan, maupun bagi pengembangan profesi akuntansi dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas.

Manfaat bagi pemerintah, antara lain untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Manfaat bagi masyarakat pengguna laporan keuangan, antara lain apabila laporan keuangan disajikan dengan basis akrua memungkinkan pengguna

laporan untuk menilai akuntabilitas pengelolaan seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari suatu entitas serta pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya kepada, atau melakukan bisnis dengan suatu entitas pemerintah. Penerapan akuntansi berbasis akrual memerlukan SDM yang andal di bidang akuntansi, memerlukan sumber daya yang memiliki pengalaman lebih pada bidang akuntansi berbasis akrual, oleh karena itu profesi akuntansi diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam penyediaan dan pengembangan SDM akuntansi di sektor pemerintahan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka simpulan dinyatakan sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan staf keuangan (X1) memiliki pengaruh positif terhadap penerapan akuntansi akrual (Y). Hal ini ditunjukkan dengan hasil penelitian bahwa tingkat pendidikan staf sebesar 59,3% dapat dijelaskan. Hasil analisis menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,218 dengan sig. 0,003. Oleh karena nilai sig. < 0,05 maka H_0 ditolak, yang artinya tingkat pendidikan staf keuangan (X1) berpengaruh positif terhadap penerapan akuntansi akrual (Y),

2. Pengalaman menjalankan basis kas menuju akrual (X2) menunjukkan nilai t hitung sebesar 4,744 dengan sig. 0,000. Oleh karena nilai sig. < 0,05 maka H_0 ditolak, yang artinya pengalaman menjalankan basis kas (X2) berpengaruh positif terhadap penerapan akuntansi akrual (Y). Berpengaruh positif artinya jika pengalaman menjalankan basis kas naik, maka penerapan akuntansi akrual juga akan naik, dan jika pengalaman menjalankan basis kas turun, maka penerapan akuntansi akrual juga akan turun.

Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini, antara lain:

1. Diharapkan penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dapat mencapai tingkat kepatuhan akuntansi yang lebih baik.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam hal pengetahuan tentang basis akrual sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 secara keseluruhan dan mendukung reformasi di bidang akuntansi akrual pemerintah yang akuntabel dan informatif.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra (2001), *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, cet.1, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Hafiz, Abdul Tanjung (2015), *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Untuk SKPD*, Cetakan pertama, Bandung : Alfabeta

Halim, Abdul (2002), *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul dan M. Syam Kusufi,(2016), *Teori, Konsep dan Aplikasi : Akuntansi Sektor Publik*, Cetakan kedua, Jakarta: Salemba Empat.

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN AKUNTANSI AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

- Hetti Herlina (2013), "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintahan Daerah Dalam Implementasi PP 71 Tahun 2010", *Skripsi*, Universitas Negeri Padang.
- Mardiasmo, (2009), *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi ke-4, Yogyakarta: CV Andi.
- Nazir, Moh (2014), *Metode Penelitian*, cet.10, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun (2010), *Standar Akuntansi Pemerintahan (Berbasis AkruaI)*, IAI: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun (2005), *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun (2006), *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Riduwan dan Engkos Achmad Kuncoro (2013), *Cara Menggunakan dan Memaknai Path Analysis (Analisis Jalur)*, cet.4, Bandung: Alfabeta
- Sigit, Soehardi (2001), *Metodologi Penelitian*, cet.2, Yogyakarta: BPFE UST.
- Sugiyono, (2014), *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi Metode R&D*, Cetakan ke-22, Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono, Sony (2003), *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Graha Ilmu Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun (2008), *Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun (2014), *Pemerintahan Daerah*.

LAMPIRAN KUESIONER

Kuisisioner Mengenai Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi penerapan Akuntansi AkruaI Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul			
Kuisisioner ini ditujukan untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan Akuntansi AkruaI di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul			
Data Responden :			
Nama :		
(Boleh diisi atau dikosongkan)			
Jenis Kelamin :	<input type="radio"/> Perempuan	<input type="radio"/> Laki-Laki	
Umur : Tahun		
Pendidikan :	<input type="radio"/> SMA/Sederajat	<input type="radio"/> Diploma	
	<input type="radio"/> Sarjana	<input type="radio"/> S2/S3	
Jurusan :	<input type="radio"/> Akuntansi	<input type="radio"/> Non Akuntansi	
Jabatan :	<input type="radio"/> Kepala Dinas	<input type="radio"/> Kepala Seksi	
	<input type="radio"/> Kepala Bidang	<input type="radio"/> Jabatan Fungsional Umum	
Bagian/Seksi :		
Masa Kerja :	<input type="radio"/> 0-5 tahun	<input type="radio"/> 11-15 tahun	
	<input type="radio"/> 6-10 tahun	<input type="radio"/> >15 tahun	

	1	2	3	4	5	
	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju	
<p>Silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah dengan memberi tanda cek (√) pada kolom yang sudah tersedia untuk jawaban yang paling sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu/Sdr/i</p>						
NO	PERTANYAAN	ALTERNATIF JAWABAN				
		1	2	3	4	5
I. Tingkat Pendidikan Staf Keuangan						
1	Kualitas SDM sebagai pelaksana penatausahaan keuangan dan pelaksanaan akuntansi belum memadai					
2	Kualifikasi pendidikan dibidang akuntansi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan yang disajikan SKPD					
3	Staf keuangan pendidikan akhir sarjana dengan pendidikan akhir tidak sarjana lebih membantu dalam penerapan akuntansi akrual					
4	Semakin tinggi pendidikan staf akan semakin memudahkan dalam menerapkan akuntansi akrual					
5	Latarbelakang pendidikan staf keuangan yang berorientasi bisnis sangat berpengaruh terhadap penerapan akuntansi akrual dibandingkan dengan non bisnis.					
6	Peningkatan pemahaman akan penerapan akuntansi basis akrual melalui kursus, pelatihan, sosialisasi, <i>workshop</i> , dsb sudah memadai					
II. Pengalaman Menjalankan Akuntansi Basis Kas menuju Akrual						
1	Bapak/Ibu sudah memahami akuntansi berbasis akrual					
2	Bapak/Ibu tidak lagi mengalami kesulitan dalam menerapkan kebijakan pengelolaan keuangan yang berlaku sekarang ini					
3	SAP berbasis akrual memberikan informasi keuangan yang komprehensif dan lebih dapat digunakan sebagai informasi dasar penyusunan perencanaan anggaran berikutnya					
4	Pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan daerah tidak tergantung kepada basis akuntansi yang digunakan tetapi tergantung sistem pengendalian intern					

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN AKUNTANSI AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

5	Penerapan SAP berbasis akrual akan menambah kesulitan bagi pmda dalam menyusun laporan keuangan					
6	Laporan pertanggungjawaban keuangan telah mengungkapkan secara lengkap semua informasi relevan yang dibutuhkan oleh pengguna dengan jujur dan objektif					
7	Laporan keuangan berbasis akrual akan lebih dapat mengamankan aset daerah					
8	Pengendalian keuangan daerah semakin baik dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi efisien dan efektifitas					
9	Dengan adanya sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan, akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat di percaya					
10	Penerapan akuntansi berbasis kas modifikasi cukup untuk menunjukkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah					
11	Penerapan akuntansi berbasis akrual akan lebih menunjukkan transparansi pengelolaan keuangan daerah					
12	Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAP berbasis akrual menyediakan informasi yang lebih baik					
13	Laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAP berbasis akrual menyediakan informasi yang lebih berguna dalam pengambilan keputusan					
III. Penerapan SAP Berbasis Akrual (PP Nomor 71/2010)						
1	Bapak/Ibu paham Aset, Kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadi transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar					
2	Bapak/Ibu paham bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima direkening kas umum daerah					
3	Bapak/Ibu paham bahwa beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan					
4	Bapak/Ibu paham Laporan Operasional menyajikan informasi beban akrual yang dapat digunakan untuk menghitung biaya per program/kegiatan pelayanan, dan juga memprediksi pendapatan sehingga bisa mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah					
5	Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan					
6	Penganggaran secara akrual dapat menimbulkan resiko disiplin anggaran					

7	Asistensi BPKP ataupun perguruan tinggi dalam penerapan SAP akrual belum memadai					
8	Fungsi Inspektorat Daerah diperlukan dalam penerapan SAP berbasis akrual di setiap SKPD untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah					
9	Pertanggungjawaban laporan keuangan oleh Kepala Daerah kepada DPRD pada akhir tahun bersifat terbuka untuk masyarakat umum					
10	Pemda responsif terhadap tanggapan yang disampaikan oleh masyarakat/DPRD atas pelaporan keuangan pemda					
11	Pelaksanaan APBD selalu diaudit oleh inspektorat selaku auditor internal					
12	Dukungan dan komitmen dari para pemimpin di sektor publik adalah faktor kunci keberhasilan dalam implementasi SAP Akrual					
13	Sarana dan Prasarana yang mendukung terlaksananya SAP berbasis akrual (misalnya: Sistem pengelolaan dan akuntansi daerah), belum memadai					
14	PPK SKPD/Bendahara paling wajib mengetahui tentang akuntansi berbasis akrual dalam penatausahaan keuangan daerah					
15	Mohon diuraikan pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i tentang apakah laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya digunakan sebagai sumber informasi tetapi juga dapat digunakan dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan? Sertakan alasan Bapak/Ibu/Sdr/i :					
					
					
					
Terima Kasih Atas partisipasinya						